**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Konsep Politik Di Indonesia**
2. **Pengertian Politik**

Secara bahasa (*etimologi*), politik dalam bahasa Yunani Kuno berarti“*polis”* yang artinya kota atau negara. Politik juga berarti “*politeia*” atau hal ihwal tentang polis atau negara, “*polites*” berarti warga kota warga negara, “*politicos*” berarti ahli negara, “*politieke techne*” berarti kemahiran politik, dan “*politieke episteme*” berarti ilmu politik.[[1]](#footnote-2)Politik juga berarti “*siyasah*” dalam bahasa Arab, diambil dari kata “*sasa-yasusu*” yang artinya mengemudi atau mengendalikan atau bisa saja mengatur dan sebagainya.[[2]](#footnote-3) Dalam bahasa inggris berarti “*politics*” artinya cerdik dan bijaksana dalam rangka untuk mencapai tujuan.[[3]](#footnote-4) Dan dalam bahasa Indonesia, politik berarti segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau negara lain*.*[[4]](#footnote-5)

Sedangkan secara istilah (*epistimologi*), pengertian politik dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan praktis. Sebagai ilmu pengetahuan, berarti menjadi disiplin keilmuan yang berdiri sendiri, dapat dipelajarai, diajarkan, memiliki komponen-komponen seperti objek, subjek, metodologi, sistem, terminologi, ciri teori yang khas dan spesifik, dan diterima secara universal di seluruh dunia.[[5]](#footnote-6)

Menurut Miriam Budiardjo, bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik.[[6]](#footnote-7) Muliansyah A. Ways, berpendapat bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dalam merebut kekuasaan dan negara. Alasan yang dikemukakan oleh Muliansyah adalah karena kehidupan manusia dipengaruhi sebagian besar oleh peranan dan pengaruh politik.[[7]](#footnote-8)

Inu Kencana Syafi’i mengutip pendapat Johan K. Bluntschli menjelaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan, yang berusaha keras untuk mengerti dalam memahami kondisi situasi negara, yang bersifat penting dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.[[8]](#footnote-9) Ramlan Surbakti menggarisbawahi, bahwa untuk memahami politik sebagai ilmu pengetahuan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu; *Pertama,* mengidentifikasi kategori-kategori aktivitas yang membentuk politik. *Kedua*, menyusun suatu rumusan yang dapat merangkum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik. Dan *ketiga*, menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab untuk memahami politik.[[9]](#footnote-10)

Adapun pengertian politik secara praktek atau implementasinya dapat didasarkan kepada beberapa pendapat ahli seperti Ramlan Surbakti yang mengemukakan 5 pandangannya, yaitu; *Pertama,* politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua,* segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga,* segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat,* kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Dan yang *kelima* adalah konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Politik juga sebagai keputusan yang mengikat seluruh masyarakat.

Dengan demikian, politik merupakan proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan untuk kepentingan umum sebagai usaha membicarakan apa yang menjadi kebaikan bersama bagi para warga negara yang hidup dalam *polis* (negara). Sedangkan kebaikan bersama itu dapat berupa nilai atau ide-ide yang dianggap terbaik di dalam masyarakat atau negara.[[10]](#footnote-11) Sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti, menurut Miriam Budiardjo, bahwa politik merupakan usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Yaitu kehidupan masyarakat suatu negara pada posisi *gemah ripah loh jinawi* seperti negara Indonesia*.* Oleh karena itu, sangat disadari bahwa posisi manusia selalu dilingkupi dan tidak dapat terlepas dari politik, walaupun pada kenyataannya tidak sedikit politik itu merugikan masyarakat yang tidak bersalah.[[11]](#footnote-12)

Namun demikian, dalam prakteknya, berbagai dilema sering muncul dalam masyarakat yang diakibatkan oleh politik. Sering kali masyarakat itu hanya menjadi komoditas politik bagi sebagian pelaku politik untuk mendapatkan pengaruhnya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Peter Merki dalam Miriam Budiardjo yang mengatakan, bahwa “politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics, at its best is a noble for a good order and justice*), walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa politik selalu menimbulkan konflik kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat yang memiliki gagasan-gagasan atau pemikiran yang dianggap ideal secara politis, ekonomis, kultural, maupun ideologis dapat direalisasikan menjadi menjadi suatu kenyataan sosial.[[12]](#footnote-13)

Menurut Janet Newman and John Clarke[[13]](#footnote-14) ada lima aspek yang perlu kita bedakan dalam memikirkan pentingnya politik untuk mengubah publik; *Pertama*, semua hal adalah politik. Klaim bahwa segala sesuatu bersifat politis menetapkan orientasi terhadap kontestasi dan konflik. *Kedua,*politik institusional: aparatur dan praktik representasi, aturan dan pemerintahan. *Ketiga,*proses pemerintahan. Pandangan politik yang pada dasarnya kotor, yaitu satu set proses dan orang yang tidak menyenangkan. *Keempat,* yaitu kita perlu mempertimbangkan apa yang terjadi antara aspek 1 dan 2 di atas: hubungan antara pandangan bahwa semuanya adalah politik dan batas-batas politik institusional. Dan *kelima,* yaitu kita perlu menjawab pertanyaan tentang bagaimana hal-hal menjadi dilihat atau diakui sebagai politik. Ini sendiri merupakan hasil perjuangan politik. Untuk bersikeras bahwa sesuatu - keputusan untuk menutup rumah sakit, misalnya - adalah politik untuk membuatnya dapat dipertanyakan dan bersikeras bahwa itu terbuka untuk sudut pandang yang berbeda, atau untuk argumen tentang nilai.

Politik dan kekuasaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang berpolitik karena ada kekuasaan, sehingga setiap kekuatan sosial akan menterjemahkan cita-citanya menjadi suatu realitas politik yang berusaha melakukan otoritatif nilai-nilai yang diyakininya untuk kepentingan bersama. Setiap individu dan kelompok memiliki kepentingan dan menempatkan politik sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan sebagai tujuan utama.

Jadi, politik dipahami sebagai ilmu adalah pengetahuan untuk menguasai. Sementara politik yang dipahami sebagai praktek adalah kemampuan menguasai untuk keberlangsungan hidup baik secara individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

1. **Pengertian Partai Politik**

Partai politik merupakan lembaga atau organisasi masyarakat yang bersifat politis. Partai politik sebagai suatu organisasi dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan objektif berarti bersifat fisik dan konkrit dan merupakan sebuah struktur dengan batasan-batasan yang pasti. Organisasi seperti itu, dikatakan sebagai susuatu yang dapat dipandang secara nyata, adanya orang-orang, hubungan-hubungan, dan tujuan-tujuan. Sebagian yang lain menyatakan, organisasi seperti itu sebagai wadah (*container view of organitation*). Sedangkan pendekatan secara subjektif, yang berarti bahwa organisasi itu sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang melalui tindakan-tindakan dengan cara berinteraksi dan bertransaksi melibatkan orang-orang sekeliling. Jadi, partai politik dalam pandekatan objektif berarti struktur dan dalam pendekatan subjektif berarti proses.[[14]](#footnote-15)

Untuk itu, bila hendak mencari organisasi maka tidak akan ditemukan, sSebab organisasi itu adalah kata benda, merupakan kata mitos. Namun, organisasi akan ditemukan sebagai peristiwa yang terjalin bersama-sama yang berlangsung dalam kawasan nyata; berupa urutan-urutan peristiwa, jalur-jalurnya, dan pengaturan temponya. [[15]](#footnote-16) Oleh karena itu, partai politik termasuk pada dua pendekatan baik objektif dan subjektif yaitu sebagai proses dimana terdapat tindakan-tindakan, interaksi, dan transaksi yang melibatkan orang-orang. Disamping itu terdapat struktur dipandang sebagai hirarki, kebijakan, dan rancangan organisasi. Sehingga partai politik itu adalah sesuatu yang nyata dengan segala ciri-cirinya sebagai sebuah tindakan politik.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik itu suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Partai politik memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.[[16]](#footnote-17)

Sedangkan dalam pandangan Ramlan Surbakti, bahwa partai politik merupakan kelompok anggota masyarakat yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.[[17]](#footnote-18) Adapun, Gunawan Sumodiningrat berpendapat, bahwa partai politik adalah kumpulan individu masyarakat yang membentuk organisasi politik karena adanya kesamaan ideologi, yang didasarkan kepada nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945.[[18]](#footnote-19)

Dilihat dari sejarahnya, pada awalnya partai politik memiliki tujuan untuk bersaing memperebutkan jabatan pemerintahan dan mengendalikan kebijaksanaan pemerintahan oleh kelompok-kelompok di luar lingkungan kekuasaan politik.[[19]](#footnote-20) Selanjutnya, keberadaan partai politik di dalam sistem politik demokrasi berfungsi sebagai penghubung[[20]](#footnote-21) antara rakyat dan pemerintah.[[21]](#footnote-22) Hingga akhirnya keberadaan partai politik secara kelembagaan merupakan suatu keharusan,[[22]](#footnote-23) sekaligus menjadi ruhnya politik demokrasi.[[23]](#footnote-24)

Salah satu tujuan partai politik adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai tujuannya tersebut partai politik berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara nasional.[[24]](#footnote-25) Pelembagaan partai politik dalam sistem demokrasi menjadi bukti suatu demokrasi itu dijalankan dalam sebuah negara seperti Indonesia. Oleh karena itu, seluruh anggotanya adalah masyarakat Indonesia yang memiliki ide atau gagasan yang sama. Organisasi yang hanya bersifat dan berlaku secara lokal atau nasional di Indonesia saja.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional (yakni hanya berlaku di Indonesia saja) yang dibentuk oleh sekolompok warga negara Indonesia secara sukarela (tidak ada paksaan atau tidak dipaksa) yang memiliki kesamaan kehendak dan cita-cita dalam rangka untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.[[25]](#footnote-26)

Organisasi politik tersebut menunjukan adanya fungsi *checks* and *balance* di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yaitu ada partai politik (pihak) yang pro atau mendukung pemerintahan dan ada pihak yang menjadi oposisi. Dalam kondisi yang demikian itu, partai politik yang pro terhadap pemerintah, yang berarti pemerintah mendapatkan dukungan dari partai politik untuk menjalankan kekuasaannya, maka disisi lain ada partai politik sebagai oposisi atau penyeimbang lajunya pemerintahan yang sedang berjalan. Jadi, partai poltik dapat menjaga kesimbangan politik demokrasi, sehingga dengan adanya oposisi itu tidak ada pemerintahan yang bertindak secara otoriter.

Pendirian partai politik di Indonesia berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum; dan kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum; serta merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.[[26]](#footnote-27)

Apabila dicermati secara mendalam apa yang menjadi pertimbangan pendirian partai politik tersebut, tentu saja bukan hanya persoalan demokrasi yang harus berdiri tegak di bumi Indonesia dan kekuasaan yang menjadi ciri khas politik demokrasi saja, namun justru yang utama dan ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat.

Tujuan pendirian partai politik secara umum adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan khususnya adalah membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. [[27]](#footnote-28) Oleh karena itu, apa yang menjadi pertimbangan, tujuan umum dan tujuan khusus untuk mendirikan partai politik harus menjadi pegangan hidup mati bagi partai politik untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.[[28]](#footnote-29)

1. **Fungsi Partai Politik**

Indonesia adalah negara hukum yaitu negara yang berdiri di atas hukum. Segala yang berkenaan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku atau peraturan yang lain termasuk keputusan presiden. Fungsi partai politik salah satu bagian yang diatur sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut;

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisisan jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
6. **Perilaku Politik**

Istilah “perilaku” merujuk kepada perbuatan konkret, dalam ungkapan literatur bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan, atau sikap, tidak saja anggota badan atau ucapan. Dalam bahasa Inggris diartikan *behavior*, yaitu daya gerak manusia secara biologis yang didasarkan pada sistem syaraf yang terdiri atas komposisi sel-sel yang disebut “*pheorons*”. Perilaku atau tingkah laku manusia dibagi menjadi dua; *Pertama, respondent behavior,* yaitu tingkah laku bersyarat dan tidak disengaja, yang senantiasa bergantung kepada stimuli. *Kedua, uperant behavior,* yaitu tingkah laku yang disengaja dan tidak selalu bergantung kepada stimuli yang ada.[[29]](#footnote-30)

Perilaku politik adalah bagian dari perilaku sosial, dimana perilaku sosial merupakan interaksi antar manusia. Diungkapkan oleh Durkheim, bahwa tingkah laku hidup seseorang adalah akibat adanya “pemaksaan” aturan perilaku yang datang dari luar individu dan memengaruhi pribadinya.[[30]](#footnote-31) Perilaku politik sebagai perilaku sosial atau tingkah laku manusia dalam interaksi sosial dilihat sebagai respons atau tanggapan (reaksi mekanis yang bersifat otomatis) dari sejumlah atau rangsangan yang muncul dalam interaksi tersebut. Seperti dalam dunia politik, pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu menaruh perhatian besar terhdadap perilaku masyarakat dalam memilih figur yang diinginkannya.[[31]](#footnote-32)

Ramlan Surbakti mengatakan, bahwa Interaksi antara pemerintah dan masyarakat di antara lembaga-lembaga pemerintah, kelompok dan individu dalam masyarakat disebut perilaku politik sebagai proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik. Perilaku politik adalah perilaku yang menunjukkan atau bersangkut paut dengan wilayah politik. Pihak-pihak yang berinterkasi dalam politik, yaitu pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Masing-masing pihak tersebut, yang satu mempengaruhi dan yang lainnya menentang, dan pada akhirnya terjadilah kompromi.[[32]](#footnote-33)

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa perilaku politik dapat dilihat pada pemerintah, partai politik, dan warga biasa. Perilaku politik oleh pemerintah adalah sebagai pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik. Sedangkan perilaku politik oleh partai politik dapat dilihat dari fungsinya yaitu sebagai partisipasi politik dengan cara mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan politik. Dan perilaku politik oleh warga masyarakat biasa, baru terlihat apabila yang dilakukannya adalah berkenaan dengan politik. Seperti perilaku politik warga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam memilih melalui proses demokrasi pada saat pemilihan umum (pemilu), baik memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah, dan juga memilih anggota perwakilan rakyat pusat dan daerah. Bentuk perilaku politik warga masyarakat biasa yang lain sebagaimana warga masyarakat yang aktif dalam kegiatan kampanye, bahkan ikut menyumbang dana untuk kegiatan politik.

Perilaku politik bisa saja baik dan tidak baik. Perilaku politik yang baik tentu saja berakibat kepada melaksanakan politik yang baik dan benar. Sehingga partai politik mampu menegakkan tujuan dan fungsinya sebagaimana yang dikehendaki sebagai partaisipasi dari masyarakat. Sebaliknya perilaku yang tidak baik akan mengarah kepada tindakan-tindakan politik yang hanya menguntungkan individu dan keleompok tertentu saja.

1. **Sistem Politik**

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi tidak disebut sebagai negara Islam, dan juga tidak disebut sebagai negara sekuler. Indonesia lebih dikenal sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila sebagai ideologi bangsa. Baik UUD 1945 dan pancasila menjadi dasar politik praktis di Indonesia.

Sistem politik di Indonesia lebih dikenal dengan politik demokrasi pancasila. Berikut ini sistem politik yang berlaku di Indonesia secara umum;

1. Demokrasi Pancasila

Demokrasi dipahami sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.[[33]](#footnote-34) Dalam pengertian ini, maka kedaulatan adalah ditangan rakyat. Oleh karena itu, terjadi silih berganti pemegang kekuasaan yang dihasilkan dari suatu proses pemilihan. Dalam pemilihan tersebut, siapa saja dapat dipilih dan semua juga memiliki hak memilih.

Menurut Afan Gaffar[[34]](#footnote-35), demokrasi dapat dilihat dari dua pemahaman, yaitu pemahaman secara normatif dan empirik. Secara normatif, demokrasi adalah sesuatu yang idaal, yang hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh negara. Menurutnya, demokrasi normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari dalam suatu negara. Maka perlu melihat demokrasi secara praktis. Dia mengutif beberapa pendapat, satu diantaranya adalah yang diungkapkan oleh Juan Linz dalam Greenstein and Polsby, HPS, Vol. 3, 1975, pp.182-183, yaitu;

“*We shall call a political system democratic when it allows the free formulation of political preferences, through the use of basic fredoms of association, information, and communication, for the purpose of free competition between leaders to validate at regular intervals by non-violent means their claim to rule; a democratic system does this without exluding any effective political office from that competition or prohibiting any members of the political community from expressing their preference by norms requiring the use of force to enforce them*”.

Menurut pendapat Revitch dan Abigail Thernstrom,[[35]](#footnote-36) bahwa landasan negara demokrasi adalah kebebasan. Kebebasan dalam negara demokrasi adalah dengan prinsip setiap orang secara bergantian wajib memerintah dan diperintah. Prinsip lain demokrasi adalah seseorang boleh hidup sesuka dia. Dari prinsip-prinsip itu, munculah yang disebut dengan ciri demokrasi yaitu pemelihan para pejabat oleh semua orang, bahwa semuanya harus berkuasa atas masing-masing, dan masing-masing pada giliranya berkuasa atas semua, termasuk tidak boleh rangkap jabatan dengan pengecualian.

Dalam negara demokrasi para pejabatan itu harus dibayar untuk jasa-jasanya, tidak ada pemerintahan yang berlangsung selamanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, demokrasi harus dibawah kekuasaan undang-undang yang berlaku di suatu negara, sehingga segala bentuk kegiatan didalam negara demokrasi dapat dikendalikan. Karena demokrasi itu adalah akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, dan menikmati hak-hak dasar.

Dalam pelaksanaannya, demokrasi adalah kata yang mudah diucapkan akan tetapi sulit dilaksanakan. Hal ini dibuktikan oleh banyak faktor, termasuk bagi penulis sendiri sebagai pelaku yang pernah menjadi bagian dalam politik demokrasi di Indonesia. Bahwa penulis pernah menjadi Calon Legeslatif (Caleg) pada tahun 2014 untuk pemeilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang terdiri dari Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Perhentian Raja. Dalam kenyataan yang penulis hadapi pada saat itu adalah ongkos politik yang mahal walaupun relatif bagi setiap orang. Jadi, demokrasi yang berjalan dengan meletakkan kedaulatan di tangan rakyat seperti proses dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bukan sesuatu yang gampang untuk dilaksanakan.

Di Indonesia demokrasi bukan hanya sekedar suatu istilah dalam dunia akademik yang dipelajari oleh para mahasiswa, namun demokrasi adalah suatu pilihan yang ditegakkan dalam politik bernegara. Maka dari itu, demokrasi tetap selalu menjadi populer di masyarakat terlebih lagi di Indonesia sebagai negara yang selalu disebukkan oleh “pesta” demokrasi yang hampir setiap tahun melaksanakan PILKADA serentak seperti pada tahun 2017 dan 2018, dan melaksanakan PEMILU serentark pada tahun 2019 yaitu PILPRES dan PILEG.

Sejarah demokrasi di Indonesia sudah mengalami beberapa periodesasi yaitu demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer (*representative democracy*), demokrasi terpimpin (*guided democracy*), demokrasi orde baru (*pancasila democracy*),[[36]](#footnote-37) dan sekarang demokrasi reformasi (*reformation democracy*).

Demokrasi menjadi sistem politik yang terbaik sebagai pilihan setidaknya sampai saat ini. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dikenal dengan NKRI, sistem politik yang disepakati adalah politik demokrasi.Mengapa sistem politik demokrasi yang harus menjadi pilihan di negara ini? Dalam sejarah berdirinya NKRI, sistem politik demokrasi mengalami perdebatan yang sangat panjang dan melelahkan. Padahal sistem demokrasi tidak sepenuhnya mencirikan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Demokrasi di Indonesia didasarkan atas ideologi bangsa Indonesia yakni pancasila. Menurut Damrah[[37]](#footnote-38) dengan menukil pendapat A. Ahsin yang mengatakan bahwa, pancasila sebagai dasar-dasar filosof terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Pancasila sebagai ideology terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam sistem demokratis, yang bersentuhan dengan nilai-nilai dan perkembangan masyarakat (Indonesia). Oleh karena itu, berdasarkan falsafah pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya.

Selanjutnya Damrah mengatakan, bahwa nilai-nilai pancasila telah bersemayam, berkembang, dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya, ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Prinsip ini mendapat tempat yang konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (1): Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap Penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Bahkan pengakuan atas eksistensi Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan rakyat mewujudkan NKRI ini dituangkan dalam alenia ke-3 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Sebagai penegasan, bahwa sistem politik di Indonesia adalah politik demokrasi pancasila dan bukan sistem politik demokrasi liberal[[38]](#footnote-39) yang dipimpin oleh kepala negara atau presiden. Kepala negara atau presiden dipilih secara langsung melalui pemilu LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia) dengan melibatkan partisipasi publik secara JURDIL (Jujur, dan Adil). Kepala negara atau presiden dibantu oleh para menteri atau kabinet. Kabinet yang dibentuk oleh presiden diberi nama sesuai dengan program kerja presiden terpilih pada pemilu lima tahunan. Presidenlah yang memilih dan memberhentikan para menteri-menterinya.

Demokrasi pancasila dilandasi oleh nilai-nilai universal ajaran Islam, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, persatuan dan kesatuan, musyawarah, kesejahteraan dan keadilan sosial. Nilai-nilai universal ajaran Islam itulah yang menyelamatkan demokrasi “pancasila” untuk menyatukan semua komponen bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras, budaya, bahasa dan lain sebagainya, dan untuk menghindarkan dari kepemimpinan yang otoriter dan diktator.

Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi di Indonesia mengalami beberapa tahap perkembangan[[39]](#footnote-40) sebagai berikut;

1. Tahap pertama, pada tahun 1945-1959 adalah demokrasi parlemen. Yakni demokrasi yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai politik.
2. Tahap kedua, pada tahun 1959-1965 adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi pada masa ini dinilai sudah menyimpang dari demokrasi pertama atau konstitusional dan menunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Tahap ketiga, pada tahun 1965-1998 adalah demokrasi pancasila. Yakni demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Menurut penulis, adanya penyeragaman pemberlakuan asas organisasi dengan menggunakan asas tunggal yakni pancasila.
4. Tahap keempat, pada tahun 1998 sampai dengan sekarang adalah masa demokrasi reformasi. Yakni penegakkan demokrasi atas demokrasi sebelumnya.
5. Multi Partai

Sejarah pemilu di Indonesia selalu diikuti oleh banyak partai politik. Mulai pada masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, sampai runtuhnya orde lama dan bubarnya rezim orde baru pada tahun 1998. Setelah itu Indonesia memasuki babak baru yang disebut dengan era reformasi sampai dengan sekarang dan masih menggunakan sistem multipartai.

Berikut ini partai peserta pemilu mulai tahun 1955 sampai dengan tahun 2004 menurut Miriam Budardjo[[40]](#footnote-41); Pemilu umum pertama kali diselenggarakan dengan agenda memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Konstituante yang diselenggarakan pada tahun 1955, pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dari partai Masyumi diikuti oleh 21partai politik (ditambah wakil tak berfraksi) sebelum pemilihan umum menjadi 28 (temasuk perorangan), yaitu; PNI, Masyumi, Nahdhatul Ulama, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, PSI, IPKI, PERTI, PRN, Partai Buruh, GPPS (*Movement to Defend the Panca Sila*), PRI, PPPRI (*Police Employees Association of the Republic of Indonesia*), Partai Murba, Baperki (*Consultative Council on Indonesia Citizenship*), PIR Wongsonegoro, Gerinda (*Indonesian Movement*), Parmai, Partai Persatuan Daya (*Dayak Unity Party*), PIR Hazairin, PPTI (*Tharikah Unity Party*), AKUI (*Islamic Victory Force*), PRD (*Village People’s Party)*, PRIM (*Party of the People of Free Indonesia*), *Acoma (Younger Generation Communists), R. Soejono Prawirosoedarso and Associates, Other Parties, organization, and individual candidates.*

Pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik hingga pada tahun 1960 sehingga hanya menjadi 10 partai, yaitu PKI, PNU, NU, Partai Katolik, Pertindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, dan Partai Islam Perti. Penederhanaan partai politik dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi partai politik, Masyumi dan PSI tidak lolos sebagai peserta pemilu.

Pada pemilu pada tahun 1977 diikuti oleh 3 orsospol (organisasi sosial politik), yaitu GOLKAR, PPP, dan PDI. Selanjtnya pada pemilu 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh tiga partai politik yang berasas Pancasila yaitu, GOLKAR, PPP, dan PDI.

Setelah runtuhnya rezim orde baru yang ditandai dengan turunnya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, kemudian digantikan dengan era reformasi saat itu juga, maka banyak partai politik baru yang bermunculan, sehingga yang ikut mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman hingga mencapai 141 partai politik. Namun, setelah dilaksanakan verifikasi dan dinyatakan dapat mengikuti pemilu pada tahun 1999 sebanyak 48 partai politik saja. Dari peserta pemilu yang ikut pemilu pada tahun 1999 sebanyak 48 parpol, hanya 5 parpol yang lolos tanpa diseleksi lagi yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB, dan PAN.

Pada pemilu 2004 sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya karena telah diterapkan sistem penyeleksian partai politik yaitu dengan *electoral threshold*. Sehingga harus ada partai politik yang langsung dapat lolos dengan terpenuhinya ambang batas 3%. Sebelum keikut sertaan parpol dalam pemilu 2004, maka harus melewati seleksi partai politik melalui 2 tahapan. Tahap pertama dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan tahap kedua dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari hasil seleksi atau verifikasi partai politik pada tahap pertama dengan jumlah partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebanyak 237 partai, dan yang berhasil lolos sebanyak 50 parpol. Sedangkan pada seleksi tahap kedua yang dilakukan oleh KPU, menghasilkan partai politik peserta pemilu 2004 sebanyak 24 parpol. Dari 24 parpol peserta pemilu 2004 yang berhasil lolos dari *electoral threshold*3% adalah sebanyak 7 parpol yakni; Golkar, PDIP, PKB, PPP, P. Demokrat, PKS, dan PAN.

Semangat pemilu sebelumnya masih terasa di tahun 2009 bahkan peserta pemilu lebih banyak dari sebelumnya. P**artai politik**yang lolos verifikasi administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2009dan menjadi peserta politik sebanyak **34**.

**Berikut** partai **politik tersebut;** Partai Barisan Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hanura, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Kedaulatan, Partai Matahari Bangsa, Partai Nasional Benteng Kerakyatan, Partai Patriot, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Pemuda Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Persatuan Daerah, Partai Republik Nusantara, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Indonesia. (PNI) Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).Ditambah 6 parpol lokal **NAD Nanggoe Aceh Darussalam,**yaitu; Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh. [[41]](#footnote-42)

Pada pemilu tahun 2014, partai politik sebagai peserta pemilu berjumlah 12 partai di tingkat nasional dan 3 partai ditingkat lokal aceh, jadi total sebanyak 15 partai politik. Partai politik sebagai peserta pemilu ditingkat nasional pada tahun 2014, yaitu 1. Partai Nasdem, 2. Partai Kebangikatan Bangsa, 3. Partai Keadilan Sejahtera, 4. Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan, 5. Partai Golkar, 6. Partai Gerindra, 7. Partai Demokrat, 8. Partai Amanat Nasional, 9. Partai Persatuan Pembangunan, 10. Partai Hanura, 14. Partai Bulan Bintang, dan 15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Dan pada pemilu tahun 2019 nanti telah ditetapkan partai politik sebanyak 15 partai di tambah partai lokal di aceh sebanyak 4 partai politik, maka total seleruhnya adalah 19 partai politik. Partai politik yang akan bertarung dalam pemilu ditingkat nasional sebanyak 15 partai sebagai beikut; 1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerindra, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golkar, 5. Partai Nasdem, 6. Partai Garuda, 7. Partai Berkarya, 8. Partai Keadilan Sejahtera, 9. Partai Perindo, 10. Partai Persatuan Pembangunan, 11. Partai Solidaritas Indonesia, 12. Partai Amanat Nasional, 13. Partai Hanura, 14. Partai Demokrat, 19. Partai Bulan Bintang, dan 20. Partai Keadilan Perjuangan Indonesia (PKPI).

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah fakta demokrasi prosedural. Diselenggarakan secara demokratis sebagai salah satu aspek penting dalam menegakkan demokrasi. Pemilu pada hakekatnya adalah untuk mengatur tentang siapa yang akan dipilih (menjadi kepala pemerintahan dan perwakilan rakyat) dan siapa yang akan memilih dalam pemilihan umum. Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif baik di pusat maupun daerah dan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden.

Sistem pemilu di Indonesia berpijak pada; *pertama,* rakyat di pandang sebagai individu-individu yang sama untuk dipilih dan memilih dengan tidak ada paksaaan dari manapun. *Kedua,* mekanisme pemilihan dengan cara perwakilan berimbang. Yakni persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tidap-tiap partai politik sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik[[42]](#footnote-43).

Pemilu sebagai jalan demokrasi menunjukan adanya kedaulatan di “tangan” rakyat yang berarti kekuasaan pemerintahan tunduk pada rakyat. Pemerintahan yang dipilih melalui pemilu mengandung pengertian bahwa pemerintahan tersebut adalah sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat. Itu sebabnya Pemilihan Umum dilaksanakan sebagai cara untuk memilih pemimpin rakyat. Pemimpin yang sudah terpilih dengan mandat rakyat bertanggung jawab kepada rakyat dan mengabdikan dirinya untuk rakyat.

Menurut Mortimer J. Adler, menyebutkan filosofi Aristoteres tentang karakter atau sifat seorang pemimpin yang memiliki *ethos, pathos, dan logos.* Pemimpin yang memiliki karakter *ethos* berarti memiliki karakter moral yang menjadi sumber kemampuannya untuk membujuk. Sedangkan seorang pemimpin yang memiliki karakter *pathos* berarti memiliki kemampuan untuk menangkap perasaan sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Dan pemimpin yang memiliki karakter *logos* berarti memiliki karakter kemampuan untuk memberikan alasan-alasan yang jitu (tepat) dan mendalam sehingga menggerakkan orang secara intelektual.[[43]](#footnote-44)

Pemilu dilaksanakan dengan kejujuran, rasa keadilan, secara langsung, terbuka secara umum, adanya suatu kebebasan dalam menentukan pilihan, dan terjaga kerahasiaannya atau disingkat JURDIL dan LUBER. Hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam berpolitik telah di jamin dalam undang-undang. Sehingga menjadi tolok ukur dari demokrasi itu sendiri, pintu masuk untuk mencapai prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan dalam konteks hukum tata negara bahwa pemilu yang dilaksanakan dengan JURDIL dan LUBER juga terkait dengan prinsip negara hukum, karena rakyat memilih dan telah mempercayai memberi hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan dan mengawasinya sebagaimana kehendak rakyat.[[44]](#footnote-45)

1. Media Massa dan Media Sosial

Untuk menjaga demokrasi sesungguhnya, media massa dan media sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan. Sebab media tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk pembentukan asumsi masyarakat. Media massa menjadi alat kominikasi politik untuk menyebarkan informasi dan pemberitaan. Media massa dapat berupa televisi, radio, internet dan surat kabar.[[45]](#footnote-46)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi sebuah kebutuhan oleh masyarakat modern.Melalui media massa dan media sosial membanjiri kehidupan masyarakat Indonesia, seperti *Facebooks, instagram, Whatsapp,* dan lain sebagainya, menjadi primadona dalam membangun komunikasi yang efektif untuk menyalurkan informasi termasuk politik. Bahkan dalam kasus yang terakhir ini, selalu menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat karena memunculkan persoalan yang sangat pelik seperti *buah simalakama*. Di satu sisi media sosial sebagai alat komunikasi politik yang efektif, namun di sisi lain sangat mudah terjadinya penyalahgunaan, sehingga banyak kasus penistaan agama, ucapan kebencian, isu sara dan lain sebagainya menyebar mudah di masyarakat.

Menurut Kacung Marijan[[46]](#footnote-47)dengan mengungkapkan pendapat Kenneth dan Ian W. Van, bahwa adaempat teori tentang ada tidaknya pengaruh media massa terhadap politik. *Pertama,*teori penguatan (*reinforcement theory*), yaitu pengaruh media massa itu minimal. Peran media pada teori ini hanya sebagai refleksi dan penguatan opini, karena yang meciptakan opini sebanarnya adalah masyarakat sendiri. *Kedua,* teori setting agenda (*agenda setting*), yaitu media massa dianggap tidak dapat menentukan apa yang kita pikirkan.

Media memiliki agenda untuk memengaruhi masyarakat dan pemerintah dengan melakukan siaran informasi-informasi tertentu berulang kali. *Ketiga,* teori *priming* dan *framing*. Pada teori *priming* media dapat mempengaruhi karena lebih fokus kepada isu-isu tertentu. Sedangkan pada teori f*raming* media melakukan *set up* yang memengaruhi penafsiran *pembaca*, pemirsa, dan pendengar tentang sesuatu isu dalam makna tertentu. Media melakukan organisasi dan menghadirkan suatu peristiwa atau isu tertentu dengan tujuan tertentu. *Keempat,* teori efek langsung (*direct effects*), yaitu media dipandang memiliki pengaruh pada sikap dan perilaku seseorang.

Elite non pemerintah, kelompok penekan, bisnes, dan organisasi-organisasi masyarakat

Elite yang memerintah: Presiden, perdana menteri, dan kabinet, pemerintah daerah maupun nasional, dan partai politik

Media (cetak, siaran, dan maya)

Publik:

Warga negara dan pemilih

**Gambar 1. Alur Komunikasi Politik Modern (Sumber Kacung Marijan 2010)**

Dia juga mengungkapkan pendapat Siebert, Peterson, dan Schramm, bahwa besar kecilnya pengaruh media terhadap politik juga tergantung sistem politik yang berlaku. Seperti sistem pers otoriter, sistem pers liberal, sistem pers komunis, dan sistem pers tanggung jawab sosial. Menurut Kacung Marijan sendiri, bahwa di dalam negara demokrasi, media adalah keharusan. Karena di dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers (*freedom of expression* dan *freedom of the pers*) adalah penting.

Dari aktor-aktor penting di dalam komunikasi itu, yang paling memiliki peran adalah para elite, khususnya elite yang duduk di dalam pemerintahan. Sementara itu, yang paling pasif adalah warga negara. Merkipun demikian, di dalam negara demokratis, selain elite yang memerintah, aktor-aktor lain yang aktif di dalam proses komunikasi politik adalah para elite yang ada di luar pemerintahan dan media massa sendiri. Di dalam negara demokrasi warga negara juga lebih aktif. Tetapi, presentase warga negara yang aktif biasanya tidaklah terlalu besar, di dalam membangun komunikasi politik, selain secara langsung dengan para elite, warga negara juga menggunakan media untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

1. Partisipasi Publik

Politik demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan politik. Keterlibatan masyarakat merupakan bentuk partisipasi publik yang menunjukan suatu pola hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara demokrasi dengan masyarakat. Pada hubungan ini, dukungan masyarakat sangatlah penting, bahkan presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada peringan HUT RI ke 72 disidang paripurna DPR dan DPD RI di Jakarta menyatakan, bahwa “kepercayaan masyarakat adalah jiwa dan energi bagi negara”.[[47]](#footnote-48)

Pola hubungan demokratis tersebut ditandai dengan;

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik,
2. Kebijakan/ keputusan politik selalu lewat uji publik,
3. Legitimasi negara (pemerintah dan parlemen) akan lemah jika tanpa memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat,
4. Pelayanan publik menjadi orientasi kebijakan dan kegiatan negara dan masyarakat.[[48]](#footnote-49)

Keikutsertaan masyarakat dalam politik sebenarnya adalah penyampaian aspirasi secara langsung melalui pemilihan langsung dalam pemilu, baik ekskutif maupun leglatif. Maka, ketika masyarakat telah memberikan hak pilihnya, tanggung jawab kepentingan masyarakat ada pada orang yang dipilihnya. Penyebab partisipasi masyarakat yang lebih luas dapat dilihat dalam proses politik sebagaimana menurut Myron Weiner dalam Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews ada 5[[49]](#footnote-50);

1. Modernisasi*;* seperti terjadinya komersialisasi pertanian, terjadinya industrialisasi, terjadinya urbanisasi, terjadinya penyebaran kepandaian baca tulis, termasuk perbaikan pendidikan, dan adanya pengembangan media komunikasi massa.
2. Perubahan-perubahan struktural kelas sosial*;* seperti terjadinya perubahan kelas sosial bawah menjadi menengah terus ke atas dan seterusnya.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern*;*seperti adanya ide-ide atau gagasan seperti egaliterisme dan nasionalisme dari para kaum inteltual – sarjana, filosof, pengerang, dan wartawan.
4. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik*;* seperti mencari dukungan rakyat dengan cara pembelaan terhadap hak-hak rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan; seperti kebijaksanaan baru tindakan-tindakan pemerintah yang menyusup (blusukan) ke segala segi kehidupan masyarakat sehari-sehari.

Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat, di antaranya adalah; pemberian suara dalam pemilihan umum; ikut menyumbangkan biaya politik dalam bentuk waktu, tenaga, dan uang; dan juga ikut serta dalam melakukan demonstrasi, protes dan pemogokan (mogok) kerja; dan lain sebagainya. Kacung Marijan mengelompokan partisipasi publik ke dalam 3 bentuk; *Pertama,* partisipasi pasif, dimana seseorang menganggap politik sebagai sesuatu yang penting, dia memiliki minat terhadap politik, dan sering berdiskusi tentang politik. *Kedua,* partisipasi aktif, seseorang ikut berada di dalam organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela seperti kelompok-kelompok keagamaan, olahraga, pencinta lingkungan, organisasi profesi, dan organisasi buruh. *Ketiga,* seseorang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan menandatangani petisi, melakukan boikot, dan demonstrasi. Namun demikian, lanjut Kacung bahwa keterlibatan warga negara dalam proses politik lebih banyak pada proses pemilihan (pemilu). Sedangkan perumusan-perumusan kebijakan publik lebih banyak oleh para wakil (pejabat publik: kepala pemerintahan dan anggota legeslatif), bukan terwakili.[[50]](#footnote-51)

1. **Pengembangan Masyarakat Islam**
2. **Pengertian Konseptual**

Secara konseptual Pengembangan Masyarakat Islam (*Islamic Commununity Development*) terdiri dari 3 suku kata, yaitu pengembangan,[[51]](#footnote-52) masyarakat,[[52]](#footnote-53) dan Islam[[53]](#footnote-54). Pengembangan Masyarakat Islam dapat dipahami dengan cara; *Pertama*, pengembangan dalam masyarakat Islam, yang berarti bahwa proses pengembangan masyarakat itu dilakukan di dalam masyarakat atau komunitas tertentu yang beragama Islam. *Kedua*, pengembangan masyarakat perspektif Islam, yang berarti bahwa pengembangan masyarakat secara umum (tidak hanya satu komunitas tertentu) yang didasarkan atas nilai-nilai agama Islam.

Pemahaman yang pertama menunjukkan kekhususan yakni komunitas muslim saja. Pengembangan Masyarakat Islam (*Islamic Commununity* Development) merupakan bagian visi agama Islam yaitu *rahmatan lila’lamiin*.Firman Allah SWT; “*Dan tidaklah kami mengutus kamu (muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*”, [Q.S. Al-Anbiya’ (21) : 107]. Cendekiawanan muslim Nurkholis Madjid atau yang biasa disapa Cak Nur menyebutkan, bahwa Islam yang rahmatan lil’alamin bercirikan menghormati keberagaman, inklusif, toleran, dialogis, mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, tidak ekstrim (*ummatan wasathon*) dan sejalan dengan nilai-nilai kemodernan dan demokrasi.[[54]](#footnote-55)

Islam tidak dapat dipisahkan dari pelakunya yakni masyarak Islam itu sendiri. Masyarakat Islam menurut Gillin & Gillin sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei yaitu kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam.[[55]](#footnote-56) Sementara Ali Syariati mendivinisikan masyarakat Islam dengan menggunakan kata *ummah* atau umat Islam. Menurutnya apabila disandarkan kepada umat yang hijrah pada masa Rasulullah, maka umat Islam adalah masyarakat yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan. Maka, *ummah* dipandang sebagai persaudaraan Islam, bagi seluruh masyarakat muslim. Hal ini, dikarenakan umat Islam itu dipersatukan oleh kesamaan pandangan dunia (*din*), yaitu tentang *tahuid* (sifat ketuhanan), keadilan (‘*adl),* dan ilmu (‘*ilm*) sebagai pengemban amanah yaitu pemimpin di dunia (*khalifah fil ardhi*).[[56]](#footnote-57)

Abdullah Nasheef mengartikan masyarakat Islam dengan *ummah* sebagai ‘bangsa’ atau komunitas. Alasannya adalah karena manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, manusia harus hidup bersama dengan manusia lain dalam satu komunitas atau kelompok. Menurutnya, *ummah* sebagai komunitas orang yang percaya kepada Tuhan yang menciptakan mereka, memelihara mereka, membahagiakan mereka, dan memberi mereka tuntunan dan kebutuhan hidup mereka.

Jadi, orang-orang yang ada di dalam komunitas Islam tersebut harus hidup menurut Islam. Kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan bukan sekedar sebatas hati saja, melainkan harus diekpresikan dalam tindakan, baik secara individu maupun kelompok, karena Islam bukan hanya sekedar agama, melainkan jalan hidup. Maka, siapapun yang memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan, adalah anggota *ummah Islam.* [[57]](#footnote-58)

Adapaun pendapat yang disampaikan oleh Quraisy Shihab yang mendasarkan kata *ummah* atauumat dalam al-Qur’an sebagai himpunan pengikut Nabi Muhammad Saw., yang mampu menerima perbedaan berbagai kelompok, sekecil apapun jumlahnya selama masih berpegang kepada arah yang sama, yaitu Allah Swt. (Q.S. Al-Anbiya’ (21): 92)[[58]](#footnote-59)

Masyarakat Islam atau *ummah* atau umat dapat diartinkan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari individu-individu yang mendiami suatu tempat untuk hidup bersama-sama, berinteraksi, yang satu sama lain saling membantu dan mempengaruhi untuk mencapai kebahagiaan dengan segala macam yang melingkupinya berdasarkan agama Islam. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Islam atau *ummah* atau umatbukanlah suatu entitas monolitik, yang berarti bercorak majemuk yang terdiri dari berbagai bangsa dan suku, berbagai ras, dan beragam warna kulit dalam satu keyakinan percaya kepada Tuhan.

Makna yang kedua yaitu sebagaimana Islam yang ditunjukkan sebagai rahmat sekalian alam. Maka, kondisi masyarakat Islam yang dimaksud adalah masyarakat yang yang bersifat hiterogen yakni bercampur baik secara agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Maka masyarakat Islam yang dimaksud sebagaimana masyarakat Islam yang ada di Madinah. Masyarakat Madinah yang berbeda-beda suku dan agama (keyakinan) hidup berdampingan antara satu dan lainnya.[[59]](#footnote-60)

Nabi Muhammad Saw mempersatukan masyarakat Madinah dengan melakukan perjanjian sebanyak 2 kali yaitu *bai’at aqabah* 1 dan *bai’at aqabah* 2. Dari perjanjian itu menghasilakan *Piagam Madinah[[60]](#footnote-61),* yaitu konstitusi atau undang-undang dasar untuk mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas dari komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah.[[61]](#footnote-62)

Amrullah ahmad dalam nanih machendrawaty dan agus ahmad safei, menegaskan dengan menyatakan bahwa Pengembangan Masyarakat Islam yaitu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.[[62]](#footnote-63) Menurut pendapat A. Surjadi, bahwa pengembangan Masyarakat Islam pada hakekatnya adalah melaksanakan amanat Allah SWT yang meliputi amanat ibadah dan amanat sebagai khalifah, untuk menegakkan yang *ma’ruf* dan memberantas kemungkaran (*al amru bilma’rufi wannahyu ‘anil munkar*), merubah situasi kepada yang lebih baik, dan merealisasikan ajaran Islam dalam segenap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, persoalan dalam Pengembangan Masyarakat Islam secara langsung bersentuhan dengan kejiwaan masyarakat, yakni merangsang, mendorong, dan menyadarkan masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan ataupun problema-problema kehidupan kelompok dan individu.[[63]](#footnote-64)

Menurut hemat penulis, teori Pengembangan Masyarakat Islam sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli di atas, tidaklah dibatasi oleh teori-teori pengembangan masyarakat pada umumnya atau teori-teori yang disampaikan oleh para ahli yang tidak terkait dengan Islam. Islam yang dimaksud dalam pengertian pengembangan masyarakat perspektif Islam merupakan spirit untuk melaksanakan secara universal sebagai agama yang dinamis yaitu semangat perubahan bagi masyarakat [Q.S. Ar-Ra’du (13) : 11]. Semangat yang dibawa oleh Islam merupakan nilai-nilai ajaran kebenaran universal dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam bukanlah suatu agama yang dapat dicocok-cocokkan kepada setiap keadaan, apalagi hanya untuk kepentingan manusia, akan tetapi Islam adalah suatu agama yang dijadikan sebagai pedoman kebeneran dalam kehidupan manusia sebagai bentuk visi *rahmatan lila’lamiin* [Q.S. Al-Anbiya’ (21) : 107].

Visi tersebut membawa dua misi penting tentang kesolehan kehidupan manusia, yaitu *hamblum min Allah* dan *hablum min annaas.* Misi *hamblum min allah (vertikal)* berarti tindakkan kesolehan individu seseorang sebagai bentuk ketaatan atau pengabdian beribadah kepada Allah dalam rupa amalan praktik ibadah seperti shalat, puasa, berdo’a dan lain sebagainya*.* Sedangkan misi *hablum min annaas* *(horizontal)* berarti tindakkan kesolehan sosial sebagai bentuk perbuatan baik kepada sesama manusia dan alam sekitarnya sebagaimana Q.S. Al-Ma’un (107) : 1-3].

Dengan demikian, Pengembangan Masyarakat Islam terbuka menerima perkembangan teori-teori Pengembangan Masyarakat modern dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh para ahli. Zubaidi mengatakan bahwa pengembangan masyarakat didasari oleh cita-cita tentang tanggung jawab manusia terhadap kebutuhannya untuk kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya sendiri secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi, dan upaya saling mendorong antara satu dengan yang lain. Termasuk komitmen para aktivis sosial dalam memecahkan masalah kesenjangan atau keterbelakangan antar kelompok masyarakat, untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya, kesempatan dan menjauhkan masyarakat dari penderitaan sosial. [[64]](#footnote-65)

Menurut Yakop Napu dkk, bahwa Pengembangan Masyarakat sebagai proses pergerakan perubahan dari suatu kondisi yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik dan seterusnya yang berasal dari dalam masyarakat baik secara sosial maupun psikologikal.[[65]](#footnote-66) Pengembangan Masyarakat juga dimaknakan sebagai suatu proses bergerak dalam tahapan-tahapan, dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahap-tahap berikutnya, yakni mencakup kemajuan dan perubahan dalam artian kreteria terspesifikasi. Contoh perubahan dari satu elit kecil (legeslatif atau eksekutif sebagai perwakilan partai politik) membuat keputusan untuk semua orang, dimana semua orang itu membuat keputusan-keputusan mengenai masalah yang menjadi perhatian bersama seperti masyarakat yang pada awalnya menggunakan sumber daya dari luar kemudian beralih menggunakan sumber daya sendiri.[[66]](#footnote-67)

Sebagaimana pandangan Jim Ife dan Frank Tesoriero yang mencontohkan pada dua perjalanan yang berbeda tetapi keduanya hendak ditempuh. Pertama, perjalan yang sudah direncanakan sangat matang, dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dan diatur sebelumnya agar sampai ke tempat tujuan secara aman dan nyaman bahkan dapat dipastikan waktu dan jarak tempuhnya. *Kedua,* perjalanan *discovery* yang sangat berbeda dari perjalanan pertama, karena perjalanan yang kedua ini tidak direncanakan atau dipersiapkan segala sesuatu sebelumnya. Namun, baik perjanan pertama maupun perjalanan kedua, sama-sama dapat diselesaikan dengan segala kemudahan dan kesulitan masing-masing selama menempuhnya. Jadi, Pengembangan Masyarakat yang sebenarnya adalah pada proses bukan pada hasilnya.[[67]](#footnote-68)

Adapun menurut Soetomo, proses yang terjadi di dalam pengembangan masyarakat ada 4.[[68]](#footnote-69) *Pertama*, proses perubahan sebagai realitas sosial. Yaitu proses dari tidak ada menjadi ada, proses miskin menjadi kaya, proses sedikit menjadi banyak adalah keniscayaan yang harus terjadi di dalam masyarakat. Yaitu suatu proses yang menunjukkan adanya perubahan menjadi lebih baik di dalam masyarakat secara terus menerus, dari waktu ke waktu, baik direncanakan atau tidak.

*Kedua*, proses dalam pemanfaatan sumber daya. Yaitu suatu proses sebagai usaha untuk mengubah sumber daya yang bersifat potensial menjadi faktual. Secara ekonomis sering disebut mengubah sumber-sumber yang bersifat potensial menjadi bersifat produktif, sehingga sumber daya tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.

*Ketiga*, proses pengembangan kapasitas. Yaitu sebagai suatu proses tindakan untuk membangun aspek manusia (skill) dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Yang termasuk membangun kapasitas masyarakat berarti mengembangkan wawasan dan tingkat pengetahuan, peningkatan kemampuan untuk merespon dinamika lingkungannya, peningkatan skill baik individu dan kelompok, peningkatan akses terhadap informasi, dan peningkatan akses dalam proses pengambilan keputusan dengan cara memberikan rangsangan dan dorongan.

Dan *keempat*, proses yang bersifat multi aspek. Yaitu kesatuan *integratif* dimensi sosial, politik, kultural, ekonomi, dan psikologi dengan memperhatikan faktor-faktor seperti usia, ras, kepentingan, dan sebagainya. Dari sisi yang lain, masyarakat yang lebih kecil merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas, sehingga akan dipengaruhi oleh pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan. Maka, disebut sebagai suatu proses pengembangan atau pembangunan masyarakat melalui pendekatan multi aspek.

Apa yang dijelaskan oleh Soetomo di atas disimpulkan dalam skema sebagai berikut;



Gambar 1. Pengembangan masyarakat dalam pembangunan masyarakat (Sumber Soetomo 2012)

Jadi, Pengembangan Masyarakat Islam adalah suatu proses mengelola sumber daya masyarakat dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang sejahtera secara bathin, fisik, dan spiritual. Potensi-potensi yang tersedia diubah menjadi faktual melalui cara-cara pengabdian, pemberdayaan, pemandirian, penguatan, pemihakan, penyiapan, perlindungan dan berkelanjutan sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

1. **Tujuan Pengembangan Masyarakat**

Pengembangan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Moh. Ali Aziz merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, rasa aman, kasih sayang, mendapat penghormatan dan kesempatan kerja secara fair, dan aktualisasi spiritual. Hal itu menurut pandangan Moh. Ali Aziz merupakan konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya atau *insan kamil*. [[69]](#footnote-70)

Oleh karena itu, pengembangan masyarakat bukan berwujud proyek usaha kepada masyarakat, akan tetapi merupakan pembenahan struktur sosial yang mengedepankan keadilan untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia melalui upaya-upaya peletakan sebuah tatanan sosial yang menempatkan manusia secara adil dan terbuka agar dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya. Pengembangan masyrakat juga bukan proses pemberian dari yang memiliki kepada yang tidak memiliki (kuat-lemah, kaya-miskin, atas-bawah dst...), akan tetapi merupakan suatu usaha penguatan dan pemandirian untuk kemandirian dan menghilangkan ketergantungan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan proses pembelajaran kemandirian untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pengembangan masyarakat harus melibatkan masyarakat itu sendiri dalam setiap tahapan yang hendak dilalui karena masyarakat adalah pihak yang lebih mengetahui tentang permasalahanya. Dan pengembangan masyarakat itu adalah usaha pemberdayaan masyarakat.[[70]](#footnote-71)

Yulizar menyebutkan bahwa pemberdayaan (pengembangan) masyarakat merupakan upaya kemanusiaan yang adil dan beradab secara struktural dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.[[71]](#footnote-72) Oleh karena itu, manusia itu harus terbebas dari kemiskinan yang melilitnya. Kemiskinan yang dimaksud oleh Yulizar meliputi materi, non materi dan dalam arti khusus. Kemiskinan materi berarti ketidakmampuan masyarakat untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok (primer) dan sekundernya. Yang termasuk kebutuhan pokok dan sekudernya adalah pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan non materi berarti kemiskinan yang menimpa jiwa dan rohani (termasuk karakter/ mental) seperti rendah diri, kehinaan, ketidakamanan, ketidaknyaman, kehilangan gairah atau pesimis, dan perasaaan tidak puas dengan apa yang diperolehnya. Sedangkan kemiskinan dalam arti khusus adalah kebutuhan manusia terhadap penciptanya atau kemiskinan agama/ spiritual.[[72]](#footnote-73)

Pengembangan Masyarakat disusun dan dilaksanakan berdasarkan dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Keterlibatan pihak lain, baik perorangan maupun organisasi (seperti lembaga dakwah, LSM, partai politik, pemerintah) hanyalah bersifat sementara yang berfungsi sebagai pendamping atau fasilitator dan transformasi nilai. Oleh karena itu, Pengembangan Masyarakat (*community development*) memiliki tujuan akhir yakni membantu masyarakat agar pembangunan dapat dilakukan dengan prakarsa sendiri dengan mengidentifikasi kebutuhannya, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraannya sendiri.[[73]](#footnote-74)

Menurut Payne dalam Alfitri yang mengatakan bahwa tujuan dasar pemberdayaan (pengembangan) masyarakat adalah untuk keadilan sosial dengan cara memberikan ketentraman kepada masyarakat, persamaan politik, dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar untuk tujuan yang lebih besar.[[74]](#footnote-75) Alfitri meyakini bahwa pengembangan masyarakat lokal adalah untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi melalui partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat. Dia menilai bahwa masyarakat itu unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi yang dimiliki oleh masyarakat belum sepenuhnya dikembangkan. [[75]](#footnote-76)

Selanjutnya, Tujuan pengembangan masyarakat menurut Fredian Tonny Nasdian yaitu menggeser struktur kekuatan politik, meningkatkan aktifitas ekonomi komunitas bisnis, pembangunan kebudayaan, memperbaiki pelayanan dan fasilitas publik, menciptakan tanggung jawab pemerintah lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki kepemimpinan, membangun kelembagaan-kelembagaan baru, melaksanakan pembangunan ekonomi dan fisik, dan mengembangkan perencanaan fisik dan lingkungan. [[76]](#footnote-77)

Menurut Totok Mardikanto dkk,[[77]](#footnote-78) bahwa tujuan pengembangan masyarakat adalah untuk pengembangan kapasitas yang meliputi empat bidang pembinaan masyarakat. Yaitu pengembangan kapasitas manusia, pembinaan usaha, pembinaan kelembagaan, dan pembinaan lingkungan sebagaimana dijelaskan lebih rinci sebagai berikut;

(1) *Pembinaan kapasitas manusia* merupakan kegiatan utama, sebab selain sebagai penerima manfaat, mutu manusia/SDM merupakan syarat utama yang akan menentukan keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Pembinaan kapasiatas manusia, meliputi : (a) *Pengembangan kapasitas individu*, seperti kapasitas kepribadian yang meliputi karakter dan pengembangan profesionalitas, (b) Pengembangan kapasitas entitas atau kelembagaan, mencangkup pengkondisian struktur kelembagaan yang dapat memberdayakan anggota. dan (c) *Pengembangan kapasitas sistem (jejaring)* yang bertujuan untuk pengembangan kerjasama antar-anggota dalam komunitas, dan pengembangan kerjasama dengan komunitas di luar sistem.

(2) *Pembinaan kapasitas usaha*. Usaha yang dimaksud mengarah pada pembentukan atau penguatan aktivitas usaha sebagai daya tarik dan wahana untuk menjaga *keberlangsungan* kegiatan pembangunan. Pada tahapan penguatan usaha, kegiatan diarahkan pada pengembangan keterampilan aspek-aspek manajerial usaha yang lebih efisien dan efektif sehingga bisa menyesuaikan tuntutan-tuntutan perubahan dari dunia usaha. Yang meliputi; pemilihan komoditas dan jenis usaha, studi kelayakan dan perencanaan bisnis, pembentukan badan usaha, perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan, pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan karir, manajemen produksi dan operasi, manajemen logistik dan finansial, penelitian dan pengembangan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis, pengembangan jejaring dan kemitraan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

(3) *Pembinaan kapasitas lingkungan* merupakan kegiatan yang diperlukan agar bina usaha tidak merusak lingkungan fisik, sosial, maupun budaya, sebab kerusakan lingkungan akan mengganggu keberlangsungan program atau kegiatan dan kehidupan masyarakat sasaran. Namun disamping mencegah terjadinya kerusakan, lingkup kegiatan pengembangan komunitas juga mengarah pada pemanfaatan lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku usaha, dan pengkondisian lingkungan sosial-budaya yang mendukung dan menciptakan keberlangsungan pembangunan komunitas.

(4) *Pembinaan kapasitaskelembagaan*. Pengembangan kelembagaan organisasi diperlukan sebagai wadah penyelesaian masalah dan mendukung keberlangsungan aktivitas bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha. Kelembagaan yang kuat diperlukan karena semua unit pembinaan memerlukan dukungan lembaga dengan tata kelola yang dapat memberdayakan anggota.Jadi pengembangan sistem pengelolaan lembaga dengan manajer atau pimpinan yang adaptif dan *empowerment* menjadi lingkup pembinaan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan komunitas.

Keempat bidang pembinaan di atas tidak terpisah satu sama lain sehingga tidak mesti dilaksanakan secara bertahap dan terpisah, tapi bisa dalam waktu yang bersamaan. Hal ini disebabkan fungsinya saling melengkapi untuk terwujudnya keberlangsungan dan tercapainya tujuan kegiatan pengembangan. Untuk mencapai tujuan, dipersyaratkan kepada setiap lembaga lokal menjalankan fungsi pengembangan, yaitu; adanya kegiatan transpormasi kapasitas yg terus menerus, sudah ada sumber keuangan internal, dan dapat menjamin serta mengolah keberlangsungan manfaat yang diperoleh semua warga komunitas (masyarakat).

Pelaksanaan pembinaan pengembangan masyarakat adalah untuk mendorong kemauan dan keberanian, meningkatkan kemampuan, serta memberikan kesempatan mengembangkan kemandirian masyarakat agar mendapatkan perbaikan kesejahteraan baik (ekonomi, sosial, fisik, dan mental) secara berkelanjutan. Ditegaskan lagi, bahwa mandiri bukanlah menolak bantuan “pihak luar”, akan tetapi berdiri di atas kemampuan dan keberanian untuk memutuskan.[[78]](#footnote-79) Dengan beitu, objek atau sasaran pengembangan masyarakat adalah pemberdayaan, partisipasi, dan pemanfaatan sumber daya masyarakat. Sedangkan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan sosial.

1. **Hakekat Pengembangan Masyarakat**

Firman Allah Swt;

... ...

Artinya : “*...Sesungguhnya allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri...*”[Q.S. Ar-ra’du (13) : 11].

Pesan yang tersirat pada ayat tersebut adalah perubahan itu terjadi bergantung kepada manusia. Penyadaran dan pembebasan sebagai prosesnya berarti manusia mengerti dan menyadari penyebab penderitaan. Bahwa penderitaan itu bukan takdir, sehingga manusia harus bisa merubah keadaan menjadi bahagia bukan menderita.

Manusia menyadari akan keadaanya yang sebenarnya sehingga berusaha untuk melakukan pembebasan atas keadaan yang menimpanya. Manusia juga menyadari akan ketidaksanggupannya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Dengan demikian baik individu maupun kelompok dapat membangun kesadaran terhadap hal-hal yang menindasnya. Artinya, mustahil Allah akan merubah suatu keadaan, kalau manusia itu sendiri tidak merubahnya. Masyarakat perlu mendapatkan pembinaan, perhatian sebagai pengakuan keberadaannya sebagai makhluk sosial, diberikan etos kerja yang kuat sebagai bekal eksistensi dirinya dalam kehidupan sosial untuk mengelola sumber daya yang tersedia menjadi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhannya.

Perubahan dari miskin menjadi kaya, dari tidak berdaya menjadi berdaya, dari tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dan seterusnya merupakan proses. Proses melengkapi dan memberi bantuan terhadap sesama merupakan cara membantu dirinya sendiri keluar dari zona kemalasan, kebodohan, kesengsaraan, dan lain sebagainya.

1. Pengabdian

Inti dari segala perbuatan dalam Pengembangan Masyarakat adalah pengabdian. Namun demikian penyadaran akan suatu arti pengabdian tidaklah dapat dipahami hanya sekedar menjalankan aktifitas pengembangan masayarakat saja. Oleh karena itu, perlu dimaknakan sebagai suatu penjelasan yang terpisah agar dapat dimengrti dan dipahami secara konfrehensif.

Manusia diberi tugas yang sangat berat oleh Allah sebagai khalifah di bumi, sekaligus bernilai mulia, yaitu untuk menjaga dan memelihara bumi agar tetap seimbang, tidak rusak, dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Firman Allah;

.

Artinya : “*Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ..."* [Q.S. Al-Baqarah (2) : 30].

...

Artinya : “*Dan kepada (kaum) tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: Hai kaumku, sembahlah allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, ...*" [Q.S. Hud (11) : 61].

...

Artinya *: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada allah ...*” [Q.S. Ali imran (3) : 110]

.

Artinya *:* “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*.” [Q.S. Ali imran (3) : 104]

Karakter masyarakat Islam memiliki kepedulian terhadap sesama sebagai bentuk rasa bahwa apa yang terjadi terhadap orang lain, berarti begitu pula di dalam dirinya. Rasa seperti itu disebut dengan kepedulian sesama. Dengan rasa kepedulian itu, menimbulkan semangat kebersamaan yang bukan saja karena kehidupan sosial semata, melainkan juga karena nilai-nilai transenden sebagai sebuah ketaatan atas agama kepada Allah Swt. Firman Allah Swt;

. . .

Artinya : “*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.*” [Q.S. Al-Ma’un (107) : 1-3].

.

Artinya : “*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*” [Q.S. Al-mukminun (23) : 8]

Pengembangan masyarakat berarti membantu masyarakat agar mampu keluar dari zona terlarang dan kembali kepada zona aman. Zona terlarang merupakan kondisi atau keadaan lemah atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan bangkit dari posisi dimana dia itu berdiri saja tidak mampu. Sebaliknya zona aman adalah kondisi sebaliknya yang berarti dia tidak perlu bantuan dari orang lain lagi untuk mendapatkan kebutuhannya. Menurut M. Ali Aziz, dkk memaknai hakekat pengembangan masyarakat adalah dengan membantu masyarakat agar masyarakat itu mampu membangun dirinya sendiri (*help people to the help himself*). Untuk itu, membantu masyarakat dengan memahami masyarakat itu senantiasa dalam suatu proses menjadi atau *becoming being* bukan memahami masyarakat dalam keadaan statis atau diam saja (*being in static state*)*.* Itulah titik tolak yang hakiki bagi semua metode dan prinsip dasar pengembangan masyarakat.[[79]](#footnote-80)

1. Partisipasi

Dalam pandangan Jim Efe dan Frank Tesoriero, “partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat”. Menurutnya partisipasi dalam pengembangan masyarakat merupakan ide HAM, dimana setiap orang memiliki hak yang sama dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif. Maka, partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat adalah alat sekaligus tujuan. [[80]](#footnote-81)

Pengembangan Masyarakat dengan pendekatan *bottom up* lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan prosesnya, mulai dari perencanaan, pengeorganisasian, penggerakan, dan penilaiannya. Partisipasi masyarakat tersebut bertujuan untuk; 1) Mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif dan berkemajuan, 2) Meningkatkan kualitas partisipatif masyarakat, dari sekadar mendukung, menghadiri, dan menjadi kontibutor program Pengembangan Masyarakat Islam, dan 3) Menyegarkan dan meningkatkan efektifitas fungsi dan peran pemimpin lokal.

Menurut Ernan Rustiadi dkk,[[81]](#footnote-82) ada lembaga-lembaga seperti pemerintah, non pemerintah dan komunitas yang dapat berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat. Tentu saja masing-masing lembaga memiliki peran sesuai dengan kapsitasnya. Bagi lembaga pemerintah perannya sangatlah besar hanya saja lebih banyak dicirikan sebagai pelaksana yang gagal karena pendekatannya bersifat *top down*. Indikator kegagalannya dapat dilihat dari tiga faktor yaitu; inefisiensi dan sistem/ struktur politik yang asimetrik. Dalam hal ini, Politiisi lebih mengutamakan kemenangan kelompok (partai politik) ketimbang membangun masyarakat. Kemudian terhentinya pelayanan masyarakat. Dan intervensi pemerintah untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sedangkan lembaga-lembaga non pemerintah dan komunitas yang didirikan atas inisiatif dari masyarakat lebih memimiliki inisiatif yang lebih kuat namun lemah dari sisi yang lain sehingga lembaga-lembaga tersebut lebih tepat sebagai pendukung lembaga pemerintahan.

Ada faktor yang menyebabkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Norman Uphof mengatakan bahwa organisasi sosial (penulis: termasuk partai politik) dalam partisipasi yang tergolong lemah atau malahan tidak ada, karena disebabkan oleh adanya ketergantungan terhadap perencanaan yang tersentralisasi. (Penulis: Seperti halnya pengurus partai politik yang ada di tingkat daerah harus mengikuti kebijakan yang ada di tingkat atasnya sampai pusat. Partai politik tidak juga dapat melepaskan diri dari kebijakan pemerintahan, sehingga partai politik tidak memungkinkan untuk berjalan sendiri tanpa kebijakan pemerintah). Padahal, pertasipasi masyarakat tidak semata-mata pada pembuatan kebijakan melainkan ketika penggalian pengetahuan. [[82]](#footnote-83)

1. Pemberdayaan

Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pengembangan manusia dalam rangka kemandirian dan pemenuhan kebutuhan manusia. Artinya, pengembangan masyarakat sebagai pembinaan untuk menjadikan masyarakat mandiri, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup yang berkwalitas.[[83]](#footnote-84) Untuk itu, orientasinya adalah kesejahteraan lahir dan batin. Masyarakat terbebas dari penindasan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan. Setelah masyarakat terbebas dari belenggu penindasan, ketidakadilan, dan kesewang-wenangan, maka akan mudah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang diidam-idamkan oleh semua anggota masyarakat melalui sekelompok elit[[84]](#footnote-85) di dalam masyarakat.[[85]](#footnote-86)

Menurut Yakop Napu dkk,[[86]](#footnote-87) pengembangan masyarakat mengutamakan sumber daya manusia. Dengan demikian proses humanisasi dalam pengembangan masyarakat dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merubah peran masyarakat yang pasif menjadi aktif. Disatu sisi seluruh kebutuhan pokok manuia harus dipenuhi seperti kebutuhan makanan yang cukup agar dapat mengembangkan potensi diri, kebutuhan tempat tinggal atau perumahan yang layak dihuni beserta keluarganya, kebutuhan pakaian yang bersih, aman, dan nyaman untuk menjaga kesehatannya, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti penerangan, transportasi, alat komunikasi yang cukup agar dapat memudahkan aktifitas hidupnya.

Secara lahir, kebutuhan masyarakat terpenuhi termasuk rasa aman, puas, dan spiritual (agama). Rasulullah memberikan motivasi agar terjadi perubahan di dalam masyarakat agar selalu dinamis, tidak bergantung orang lain melainkan tumbuh kemandirian sejati, tidak pasrah kepada nasib dan keadaan namun menjadi lebih bersemangat. Perubahan itu untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan manusia di dunia. Dalam hadis (walaupun sanadnya lemah) tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi untuk kebaikan, di sebutkan bahwa;

مَنۡ كَانَ يَوۡمُهُ خَيۡرًا مِنۡ اَمۡسِهِ فَهُوَ رَابِحُ. وَمَنۡ كَانَ يَوۡمُهُ مثل اَمۡسه فهو مَغۡبُون. ومَن كان يومه شَرًّا مِنۡ امسه فهو مَلۡعُون

Artinya : “*Barang siapa yang hari ini lebih baik dari pada hari kemarin, maka dia adalah yang yang beruntung. Sedangkan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Dan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah yang celaka.”*

Pembinaan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor-faktor yang berasal dari dalam yaitu perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Sedangkan faktor perubahan yang berasal dari luar masyarakat yaitu bencana alam. Yakop Napu dkk menggunakan teori sosial dalam perubahan dan pengembangan masyarakat yang diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu; sebagai proses diferensiasi dan integrasi, sebagai suatu proses perubahan dan pembentukan nilai-nilai modern, dan sebagai suatu proses secara radikal.[[87]](#footnote-88) Hakekatnya adalah pengabdian untuk suatu perubahan ke arah yang lebih baik.

1. **Pengelolaan Pengembangan Masyarakat**

Pengelolaan atau manajemen disebut sebagai tindakan mengatur. Orang yang menggunakan tindakan manajemen disebut sebagai manajer atau pengatur. Dalam bukunya J. David Hunger dan Thomas L. Mheelen yang mengutip pendapat dari laporan American Assembly of Collegiate school of business dan European Foundation Management Development yang menyatakan bahwa tantangan tersebesar dalam manajemen adalah hidup dengan ketidakpastian.[[88]](#footnote-89) Untuk itu, manajemen digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan agar ada kepastian. Artinya dengan tindakan manajemen suatu tujuan yang sudah ditentukan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Syahrizal Abbas berpendapat bahwa manajemen itu sebagai strategi bagi pemimpin dengan menggunakan kemampuan (*skill*) yang dimilikinya untuk mengatur organisasi.[[89]](#footnote-90) Sedangkan Imam Gunawan dan Djum Djum Noor Benty, mengungkapkan bahwa manajemen sebagai suatu proses penataan yang melibatkan sumber daya potensial berupa manusia dan non manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.[[90]](#footnote-91)

Pendapat lain memahami manajemen dari sudut pandang fungsi manajemen. Manajemen dari sudut pandang ini berarti implementasi fungsi manajemen. Seperti, Jejen Musfah mengartikan manajemen yaitu usaha-usaha yang digunakan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan dengan sumber daya organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengewasan. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa inti manajemen adalah pengaturan.[[91]](#footnote-92) Adapun menurut Aziz Muslim, fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, *penelitian*, penempatan personil, evaluasi, dan penganggaran.[[92]](#footnote-93)

Sedangkan bagi Jan Hoesada, fungsi manajemen yaitu perencaaan (planning) yang berarti menentukan dan pembentukan rencana kagiatan, pengorganisasian (*organizing*) yang berarti mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang ada, memimpin dan memotivasi (*leading/motivating*) yang berarti menggunakan kemahiran untuk mengfungsikan sumberdaya yang ada, dan pengendalian dan pemantauan (*controlling* dan *monitoring*) yang berarti membandingkan antara rencana dengan proses dan melakukan perbaikan untuk tindakan selanjutnya.[[93]](#footnote-94)

Sementara itu, menurut Goerge R. Terry dan Leslie W. Rue fungsi manajemen ada lima. *Pertama,* planning yaitu menentukan tujuan dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. *Kedua,* organizaing yaitu mengelompokan, menentukan dan memerikan kewenangan untuk kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan. *Ketiga,* staffing*,* mengatur sumberdaya manusia. *keempat,* motivating*,* yaitu mengarahkan perilaku manusia untuk mencapai tujuan. Dan *kelima,* controlling yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan dan perencanaan kegiatan dan membuat perbaikan untuk kegiatan selanjutnya yang diperlukan.[[94]](#footnote-95)

Manajemen mengandung makna yang luas, sedangkan makna khususnya seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen kinerja, manajemen strategi, manajemen pendidikan, manejemen kurikulum, manajemen mutu, termasuk manajemen pengembangan masyarakat. Apabila dispasifikasikan lagi, maka manajemen pendidikan dapat dikategorikan sebagai manajemen dalam makna yang luas, sedangkan makna khususnya adalah manajemen kurikulum, manajemen dosen dan guru, atau manajemen siswa, dan lain sebagainya.

Memperhatikan pengertian manajemen sebagaimana di atas, maka apa yang dimaksud manajemen pengembangan masyarakat menunjukan pemahaman terhadap implentasi manajemen dalam praktik kegiatan pengembangan masyarakat. Manajemen pengembangan masyarakat berarti tindakkan mengatur kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat.

Tindakan manajemen pengembangan masyarakat sekurang-kurangnya meliputi 3 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian/pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi.

1. **Perencanaan (*Planning*)**

Dalam pengembangan masyarakat, perencanaan berarti menentukan arah selanjutnya dan merupakan usaha sebelum dilaksanakan tindakan pengembangan. Dengan demikian perencanaan merupakan penentuan terhadap hal-hal yang terkait dengan aktifitas atau kegiatan yang akan diselenggarakan. Perencanaan dapat menentukan tujuan dan langkah-langkah tindakan, pengembangan aturan dan prosedur-prosedur, pengembangan rencana, dan melakukan peramalan.

1. **Pengorganisasian (*Organizing*)/Pelaksanaan (*Actuating*)**

Pelaksanaan suatu pekerjaan berarti menjalankan segala yang yang sudah ditentukan dalam tindakan perencanaan. Dalam melakukan kegiatan dibutuhkan pengorganisasian untuk menjalankan kewenangan mengatur posisi atau tindakan pekerjaan. Yaitu mengorganisasikan tugas-tugas kepada anggota organisasi (pengurus partai politik), dapat juga berupa pendelegasian wewenang kepada posisi yang dibawahnya, membuat jaringan (*network*), dan melakukan koordinasi pekerjaan.

1. **Pengawasan (*Controlling*)/ evaluasi (*evaluating*)**

Pengawasan hampir sama dengan evaluasi, yang berarti melakukan tindakan mengawasi suatu pekerjaan baik sedang dalam pelaksanaan, maupun sesudahnya. Hal yang terkait dengan menentukan standar kinerja atau penampilan, membandingkan penampilan sesungguhnya dengan standar yang sudah ditentukan, dan melakukan perbaikan sekaligus terhadap hal-hal yang diperlukan.

1. **Kontribusi Partai Politik Dalam Pengembangan Masyarakat Islam**

Kontribusi dalam pengembangan masyarakat Islam dapat dilakukan oleh partai politik pada upaya kegiatan mendidik dan memberdayakan masyarakat. Upaya mendidik masyarakat dilakukan dengan menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidkan politik. Sementara usaha memberdayakan masyarakat menjalan fungsinya sebagai sarana pengendalian konflik, sosialisasi dan komunikasi politik, dan rekrutmen politik.

1. **Mendidik Masyarakat**

Fungsi mendidik masyarakat merupakan kerja partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Yaitu upaya membentuk masyarakat yang berkualitas sehingga lebih mampu berkiprah untuk mengembangkan diri dalam pengembangan masyarakat.[[95]](#footnote-96) Masyarakat berkualitas meliputi; 1. Adanya kesetaraan dalam memperoleh kesempatan (*Equal Access to Opportunity*). 2. Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*). 3. Adanya peningkatan produktifitas (*productivity)* sumberdaya manusia yang berkualitas. Dan 4. Pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat.[[96]](#footnote-97)

Mendidik masyarakat juga sebagai upaya penyadaran dalam rangka melemahkan sifat-sifat yang berkembang di dalam masyarkat seperti prasangka kolektif, pengkambinghitaman, pelabelan, dan ketidakpedulian,[[97]](#footnote-98) untuk selanjutnya berubah menjadi meningkatkan kesadaran masyarakat dan organisasi. Kesadaran masyarakat terdiri dari kesadaran personal yang berarti kemampuan untuk menghubungkan pengembangan personal (baik kader partai dan masyarakat luas) dan politik, kemampuan berbagi pengalaman, dan memikirkan situasi masyarakat dengan membuka peluang bertindak. Sedangkan kesadaran organisasi yaitu kemampuan bertanggung jawab untuk merencanakan, pengorganisasian, dan penyediaan jasa kemanusiaan seperti kesehatan, pendidikan, bantuan keuangan, dan perawatan orang-orang yang menjadi tanggungan (kader).[[98]](#footnote-99)

Proses mendidik berupa memfasilitasi dengan cara merangsang dan mendukung proses pengembangan masyarakat[[99]](#footnote-100) yang meliputi;

1. Peningkatan kesadaran, yaitu memberikan kesadaran terhadap masyarakat baik personal maupun organisasi untuk ikut berpartisipasi dalam proses perubahan sosial.
2. Memberikan informasi, yaitu memberikan berbagai macam informasi kepada masyarakat tentang profil, program, sumber daya, dan kejadian-kejadian penting di masyarakat.
3. Konfrontasi, yaitu cara menghadapi masyarakat atau kelompok dalam masalah-masalah seperti konsekuensi atau tindakan masyarakat atau kelompok, implikasi legal terhadap tindakan individual atau kelompok, isu-isu moral atau isu-isu prinsipal dibanding atas isu legal, dan dinamika internal kelompok atau masyarakat. Untuk itu, konfrontasi ini bisa digunakan dalam rangka pengembangan masyarakat, namun seringkali digunakan sebagai ego pribadi. Akan tetapi, konfrontasi ini menjadi penting manakala digunakan untuk keberlangsungan hidup berbagai struktur dan proses pengembangan masyarakat.
4. Pelatihan, yaitu mengajarkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Namun pelatihan ini tidak dapat dilakukan dengan cara sembarangan. Pelatihan harus memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelatihan pada dasarnya tidak boleh dipaksanakan hanya karena ingin merubah suatu keadaan masyarakat tetapi dengan cara dipaksakan.

Ada bebarpa hal yang harus diperhatikan oleh partai politik dalam memberikan pelatihan agar efektif dan efisien, yaitu;

1. melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan menikmati manfaat,
2. merespon adanya keinginan kebutuhan masyarakat,
3. berbagi ilmu dan ketrampilan dalam proses pengembangan masyarakat,
4. fokus kepada kebutuhan spesifik kelompok atau masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memberikan hak kepada masyarakat tentang peluang hidup, untuk mempertahankan HAM, mengartikan kebutuhannya sendiri, mengungkapkan gagasan-gagasan, mendapatkan kemudahan untuk mengakses lembaga-lembaga sosial, mendapatkan akses kemudahan terhadap sumber daya untuk dimanfaatkan, pemerataan ekonomi, dan keadilan reproduksi.[[100]](#footnote-101)

1. **Memberdayakan Masyarakat**

Menurut Totok Mardikanto, dkk, bahwa pemberdayaan berarti upaya untuk memampukan (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) dan memandirikan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan cara (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dan (3) melindungi masyarakat.[[101]](#footnote-102) Untuk itu, Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei menjelaskan bahwa memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat berdaya. Yaitu masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.[[102]](#footnote-103)

Posisi partai politik, dalam hal ini adalah untuk memastikan perubahan sosial yang lebih baik, yang berkaitan dengan kekuasaan, pengetahuan, kearifan dan perubahan. Sehingga proses itupun menjadi kesempatan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam rangka mengesahkan dan menggunakan pengalaman, pengetahuan, keahlian dan ketrampilan lokal.[[103]](#footnote-104)

Fungsi memberdayakan masyarakat merupakan kerja partai politik sebagai sarana pengendalian konflik, komunikasi dan sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Pengendalian konflik yang dilakukan oleh partai politik menurut Jim Ife dan Frank Tesireiro yaitu dengan cara menghidupkan gagasan-gagasan tentang semangat menghargai kearifan lokal melalui menghargai pengetahuan lokal, kebudayaan lokal, sumber daya lokal, ketrampilan lokal, dan proses lokal.[[104]](#footnote-105) Menurutnya menghargai pengetahuan lokal berarti partai politik menyadari bahwa masyarakat memiliki pengetahuan bahkan yang paling tahu terhadap dirinya dan kebutuhannya sendiri. Sehingga partai politik pada posisi menjadi pendengar yang budiman dan menjadi pembelajar yang baik dari masyarakat. Menghargai kebudayaan lokal, berarti partai politik menyadari bagaimana mengerjakan sesuatu yang benar, apa yang penting, keadilan, interaksi pribadi, tempat-tempat perempuan, cara membesarkan anak, peran keluarga, pentingnya pendidikan, dan sampai pada memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada.

Sementara itu, menghargai sumber daya lokal dengan meletakkan prinsip pengembangan masyarakatnya pada kswasembadaan. Artinya pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh partai politik diarahkan untuk mencapai masyarakat yang berswasembada sumber daya yang dimilikinya sendiri daripada dari sumber daya luar (*eksternal*). Proses dari bawah atau *bottom-up* sebagaimana yang dimaksud akan memerlukan biaya yang banyak pada awalnya tetapi tidak lama, sampai meninggalkan ketergantungan-ketergantungan dari luar.

Sering kali terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita lebih menghargai dan mencari kepakaran dari luar ketimbang sumber daya lokal dalam bentuk ketrampilan lokal yang ada. Pengembangan masyarakat hakekatnya solusi untuk melakukan pemberdayaan dalam rangka penguatan sumber daya lokal dan bukan pada posisi untuk melemahkan bahkan sampai menghilangkannya. Artinya, bahwa memanfaatkan atau menggunakan ketrampilan lokal merupakan bentuk menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kesempatan berkontribusi bagi masyarakat lokal dalam rangka memperkuat tingkat keswadayaan dan modal sosial.

Dan menghargai proses lokal berarti partai politik menggunakan proses yang terjadi sudah lama di dalam masyarakat. Partai politik menilai proses-proses sosial yang berasal dari luar masyarakat tertentu belum pasti dapat diterima oleh masyarakat lokal sedangkan proses lokal sudah pasti akan diterima. Contoh proses lokal di dalam suatu pertemuan. Masyarakat biasanya melakukannya dalam kondisi duduk bersila dilantai sambil menikmati hidangan dan santai. Dalam kondisi tersebut masyarakat merasa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah baik tua-muda, pemuka masyarakat dengan masyarakat biasa, laki-laki dan perempuan, yang kaya dan miskin, dan sebagainya. Dengan begitu pertemuannya diharapkan mendapatkan hasil yang terbaik.

Sementara itu, komunikasi dan sosialisasi partai politik sebagai upaya perekat atau polarisator kepada masyarakat untuk menikmati kemerdekaan dari segala ketidak-adilan, kebodohan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan konsensus yaitu mencari kesepakatan, dan mendapatkan solusi dari masyarakat (*bottom up*)*.* Cara yang digunakan adalah dengan melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan, dan membantu masyarakat saling berkomunikasi dengan dialog, pemahaman dan aksi sosial. Selanjutnya, melalui partisipasi masyarakat, menimbulkan situasi saling ketergantungan satu sama lain untuk bersama, dan untuk menyelesaikan tugas dan memberi peluang interaksi formal dan informal.[[105]](#footnote-106)

Sedangkan upaya rekrutmen politik dalam pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan keberdayaan dan yang dirugikan. Pemberdayaan merupakan strategi keadial sosial yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Dengan demikian, rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik merupakan memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan, kemudian kekuasaan itu di distribusikan kepada masyarakat luas.[[106]](#footnote-107)

Sasarannya adalah mencakup kelompok-kelompok primer di antaranya adalah kelompok kelas yaitu kaum miskin penganggur, pekerja berpenghasilan rendah, penerima jaminan sosial. Kelompok gender yaitu perempuan. Dan kelompok ras atau etnisitas yaitu masyarakat pribumi minoritas dan kultural. Kelompok lain yang dirugikan yaitu manula, anak-anak, dan kaum muda penyandang cacat (fisik, mental, dan intelektual), homo dan lesbian terisolasi (secara geografis dan sosial), dan sebagainya. Dan pribadi yang dirugikan yaitu dukacita, kehilangan, dan masalah-masalah pribadi dan keluarga.[[107]](#footnote-108)

Dengan demikian, memberdayakan masyarakat melalui fungsi pengendalian konflik, komunikasi dan sosialisasi politik, dan rekrutmen politik, berarti; [[108]](#footnote-109)

* + - * 1. Menolong individu maupun kelompok yang dirugikan untuk bersaing antar individu maupun kelompok yang lain, yang sama-sama memiliki kepentingan dalam ‘aturan’ politik. Bentuk pemberdayaan itu berupa ketrampilan melobi, menggunakan media, melakukan aksi politik, memanfaatkan sistem, dan lain sebagainya.
        2. Mengajak bergabung dan mempengaruhi elit, mengkonfrontasi dan berusaha mengubah elit. Pandangan ini membutuhkan ketlibatan masyarakat ke dalam politik praktis sehingga mampu berkompetisi mendapatkan kekuasaan politik melalui partai politik. Caranya dengan masuk atau bergabung ke dalam partai politik, bersekutu dengan profesi seperti ahli hukum, dan mengurangi kekuasaan elit.
        3. Menata struktur masyarakat agar terjadi kesetaraan, tidak ada struktur masyarakat yang dominan, sehingga perubahan sosial masyarakat dapat dicapai.
        4. Melakukan perubahan wacana, mengembangkan pemahaman subjektif yang baru, memvalidasi suara-suara lain, dan membebaskan pendidikan.

1. Muliansyah A. Ways, Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik, dan Welfare Stste, (Yogyakarta: Buku Litera, 2015), h. 4 [↑](#footnote-ref-2)
2. M. Quraisyh Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 2000), cet. X, h. 416 [↑](#footnote-ref-3)
3. Inu Kecana Syafi’ri, *Etika Politik,* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012), h. 77 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) , h. 886 [↑](#footnote-ref-5)
5. Inu Kecana Syafi’i, *op.cit*, h. 78 [↑](#footnote-ref-6)
6. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), cet. 3, h. 13 [↑](#footnote-ref-7)
7. Muliansyah A. Ways, *op.cit,* h. 3 [↑](#footnote-ref-8)
8. Inu Kencana Syafi’i, *op.cit,* h. 78 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 2 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ramlan Surbakti, *op.cit*, h. 2-26 [↑](#footnote-ref-11)
11. Miriam Budiardjo, *op.cit*, h. 13-15 [↑](#footnote-ref-12)
12. Miriam Budiardjo, *Ibid*, h. [↑](#footnote-ref-13)
13. Janet Newman and John Clarke, *Publics, Politics, & Power: Remaking the Publics in Public Services,* (Singapore: Sage Publication Asia-Pasific Pte. Ltd., 2010), h. 21-22 [↑](#footnote-ref-14)
14. R. Wayne Pace dan Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan,* ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. ke 3, h.11 [↑](#footnote-ref-15)
15. R. Wayne Pace dan Don F. Faules*, Ibid,* h. 78 [↑](#footnote-ref-16)
16. Miriam Budiarlo, *Op.cit*, h. 403 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ramlan Surbakti, *Op.cit*, h. 148 [↑](#footnote-ref-18)
18. Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, Revolusi Mental; Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), h. 57 [↑](#footnote-ref-19)
19. Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik,* (Yogyakarta: Gadjah Mada Unversity Press, 2011), cet. 19, h. 75 [↑](#footnote-ref-20)
20. Jimly Asshiddiqie,*op.cit,*  h. 401 [↑](#footnote-ref-21)
21. Mochtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), cet. 19, h. 75 [↑](#footnote-ref-22)
22. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* (Radja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), cet. ke 3, h. 402, [↑](#footnote-ref-23)
23. Muliansyah A. Ways, *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, partai Politik, dan Wellfare,* (Yogyakarta: Buku Litera, 2015), h. 131 [↑](#footnote-ref-24)
24. Hafiz Ansyary A.Z, Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2008). [↑](#footnote-ref-25)
25. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik [↑](#footnote-ref-26)
26. Pendahuluan poin a, b, d, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik [↑](#footnote-ref-27)
27. Pasal 10 ayat 1 poin d da ayat 2 poin c Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik [↑](#footnote-ref-28)
28. Pasal 13 poin c Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik [↑](#footnote-ref-29)
29. Lihat Wasty Soemanto, *Psikolodi Pendidikan* dalam Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Idiologi Strategi sampai Tradisi,* (Bandung: PT Rosda Karya, 2001), h.54 [↑](#footnote-ref-30)
30. I.B. Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Difinisi Sosial, dan Perilaku Sosial,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 14 [↑](#footnote-ref-31)
31. I.B. Irawan, *Ibid*, h. 169 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ramlan Surbakti, *op.cit*. h. 20 [↑](#footnote-ref-33)
33. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945; “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-Undang”, dan pasal 29 ayat 2; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. [↑](#footnote-ref-34)
34. Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi,* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3 [↑](#footnote-ref-35)
35. Diane Revitch dan Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik dan Modern,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 13 [↑](#footnote-ref-36)
36. Afan Gaffar, *of.cit*, h. 10 [↑](#footnote-ref-37)
37. Damrah Mamang, *Op.cit*, h. 16 [↑](#footnote-ref-38)
38. Ubaidilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia: Kritik dan Solusi Sistem politik Efektif,* (Jakartta, Bumi Aksara, 2016), h. 126 [↑](#footnote-ref-39)
39. Miriam Budiardjo, *op.cit,* h. 127-128 [↑](#footnote-ref-40)
40. Miriam Budiardjo, *Ibid*, h. 434-441 [↑](#footnote-ref-41)
41. <https://yuhendrablog.wordpress.com/2008/07/09/daftar-nama-partai-politik-parpol-peserta-pemilu-2009-indonesia/> dikases pada tanggal 21 Juni 2018 pada jam 11.03 wib [↑](#footnote-ref-42)
42. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Radja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), cet. ke 3, h.425 [↑](#footnote-ref-43)
43. L. Murbandono, HS., *Pemikir Besar Dunia: Ucapan dan Kebijaksanaan,* (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 192-193 [↑](#footnote-ref-44)
44. Lihat Asas Penyelenggaraan Pemilu pada Bab II pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum [↑](#footnote-ref-45)
45. Yana Suryana dkk, *op.cit*, h. 35 [↑](#footnote-ref-46)
46. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarata: Kencana, 2010), h. 282-286 [↑](#footnote-ref-47)
47. Pidato presiden Joko Widodo dalam rangka HUT RI di sidang paripurna DPR RI dan DPD RI di Jakrta pada tanggal 16 Agustus 2017 [↑](#footnote-ref-48)
48. Kacung Marijan, *Ibid,* h. 28 [↑](#footnote-ref-49)
49. Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews, *Pebandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), Cet. ke 19, h. 56-59 [↑](#footnote-ref-50)
50. Kacung Marijan, *Op.cit*, h. 111 [↑](#footnote-ref-51)
51. Secara etimologi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengembangan berarti proses atau cara atau perbuatan mengembangkan. Kata lain yang memiliki makna yang sama dengan kata pengembangan adalah kata pembangunan yang berarti proses atau cara atau perbuatan membangun. Kedua kata “pengembangan” dan “pembangunan” dalam bahasa Inggris berarti *development*. (Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Balai Pustaka: Jakarta, 2005), Edisi ketiga, cet. ke 3, h. 538 dan 103). [↑](#footnote-ref-52)
52. Adapun kata “masyarakat” dalam bahasa Inggris berarti *society* atau *community.* Kata *society* yang berarti masyarakat secara umum dan *community* yang berarti masyarakat dalam makna komunitas atau kelompok tertentu. (Lihat Jim Ife dan Frank Tisoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet. 2, h. Vi) Dalam bahasa Indonesia, “masyarakat”berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. (Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Balai Pustaka: Jakarta, 2005), Edisi ketiga, cet. ke 3, h. 721). Menurut Soerjono Soekanto masyarakat atau masyarakat setempat, merujuk kepada masyarakat desa, kota, suku, atau bangsa yang anggota-anggotanya dalam suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil yang hidup sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama yang tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu. (Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132) Koentjaraningrat berpendapat bahwa masyarakat merupakan sekumpulan atau satu kesatuan manusia yang saling “bergaul”, atau “berinteraksi”. Interaksi dalam sekumpulan atau kesatuan manusia tersebut diikat oleh pola tingkah laku yang khas dengan semua faktor kehidupannya sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”. (Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*¸ (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 108). Adapun menurut Quraisy Shihab masyarakat adalah sekumpulan individu yang terikat oleh adat, ritus atau hukum khas yang hidup bersama. (Lihat Quraish Shihab, *Wawan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*¸ (Bandung: Mizan, 2000), cet. x, h. 319). Al-Farabi memiliki pandangan tersendiri mengenai masyarakat Islam sebagai masyarakat utama yaitu masyarakat terbaik, yang bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan kebahagiaan. (Lihat Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007, h. 83). [↑](#footnote-ref-53)
53. Kata Islam mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Secara istilah Islam adalah agama yang bersumber dari wahyu yang datang dari Allah Swt. dan Islam adalah nama agama yang diberikan oleh Allah Swt. Dilihat dari segi ajarannya, maka Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia, yaitu agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang pernah di utus oleh Allah Swt. (Lihat Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), cet. 14, h. 63-66). [↑](#footnote-ref-54)
54. Damrah Mamang, *Op.cit*, h. 18 [↑](#footnote-ref-55)
55. Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi,* (Bandung: Rosda Karya, 2001, h. 5 [↑](#footnote-ref-56)
56. Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Ibid*, h. 6 [↑](#footnote-ref-57)
57. Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Ibid*. [↑](#footnote-ref-58)
58. M. Quraisy Shihab, *op.cit,* h. 327 [↑](#footnote-ref-59)
59. M. Dawam Raharjo, (Editor), *Model Pembangunan Qaryah Thayyibah: Suatu Pendekatan Pemerataan Pembngunan,* (Jakarta: PT Intermasa, 1997), Cet. 1, h. 78 [↑](#footnote-ref-60)
60. Piagam Madinah dimuai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, berisikan 47 pasal adalah manifestasi dari berbagai suku, agama, dan komunitas di Madinah. Lihat H. Munawir Sjadjali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), Edisi 5, h. 10-15 [↑](#footnote-ref-61)
61. H. Munawir Sjadjali, *Ibid*, h. 10 [↑](#footnote-ref-62)
62. Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Op.cit*, h. 29 [↑](#footnote-ref-63)
63. A. Surjadi, *Da’wah Islam dengan Pembangunan Masyarakat Desa,* (Bandung: Mandar Maju, 1989),h. 28-30 [↑](#footnote-ref-64)
64. Zubaidi, *Op.cit*, h. 2-3 [↑](#footnote-ref-65)
65. Yakop Napu, dkk, *Pengembangan Masyarakat: Manusia Satu Sama Lain Saling Mendidik Dengan Perantara Dunia*, (Gorontlo: Andag Gika Press, 2009), h. 35 [↑](#footnote-ref-66)
66. Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 33 [↑](#footnote-ref-67)
67. Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Op.cit*, h. 336 [↑](#footnote-ref-68)
68. Soetomo, *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet. kedua, h. 42-319 [↑](#footnote-ref-69)
69. Mo. Ali Aziz, *Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodlogi,* (Pustaka Pesantren: Yogyakarta,2005), h. 5 [↑](#footnote-ref-70)
70. Moh. Ali Aziz, *Ibid,* h. 5-7 [↑](#footnote-ref-71)
71. Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah,* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 65 [↑](#footnote-ref-72)
72. Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Ibid*, h. 30-39 [↑](#footnote-ref-73)
73. Aziz Muslim, *Op.cit*, h. 3 [↑](#footnote-ref-74)
74. Alfitri, *Community Development: Teori dan Aplikasi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 23 [↑](#footnote-ref-75)
75. Alfitri, *Ibid,* h. 31 [↑](#footnote-ref-76)
76. Fredian Tonny Nasdian, *Op.cit*, h. 30 [↑](#footnote-ref-77)
77. Totok Mardikanto dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat,* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 155-157 [↑](#footnote-ref-78)
78. Totok Mardikanto dkk, *Ibid,* h. 160 [↑](#footnote-ref-79)
79. Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, dan A. Halim (editor), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi,* (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2009), cet. kedua, h. 4 [↑](#footnote-ref-80)
80. Jim Ife dan Frank Tesoriero, h. 295 [↑](#footnote-ref-81)
81. Ernan Rustiadi, Sunsun Saeful Hakim, dan Dyah R. Panulu, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah,* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 458-464 [↑](#footnote-ref-82)
82. Michael M. Cernea (editor), *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologidi Dalam Pembangunan Pedesaan,* (UIP, Publikasi Bank Dunia), h. 458 [↑](#footnote-ref-83)
83. Abdul Rahmat dkk, [↑](#footnote-ref-84)
84. Pejabat publik; presiden (eksekutif), anggota dewan (legeslatif), dan lain-lain [↑](#footnote-ref-85)
85. Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, dan A. Halim, *Op.cit*, h. 15-18 [↑](#footnote-ref-86)
86. Yakop Napu dkk, *Op.cit*, h. 23-25 [↑](#footnote-ref-87)
87. Yakop Napu dkk, *Op.cit*, h. 25-26 [↑](#footnote-ref-88)
88. J. David Hunger dan Thomas L. Mheelen, *Manajemen Strategis*, (Yogjakarta: Penerbit Andi, 2003), h. 3 [↑](#footnote-ref-89)
89. Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi Beberapa Catatan,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet. ke 3, h.14 [↑](#footnote-ref-90)
90. Imam Gunawan dan Djum Djum Noor Benty, *Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar Praktik,* ((Bandung: Alfabeta, 2017), h. 22 [↑](#footnote-ref-91)
91. Jejen Musfah, *Manaemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan praktik,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet. ke 2, h.2 [↑](#footnote-ref-92)
92. Aziz Muslim, ‘Manajemen Pengelolaan Masjid’, *Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 5.2 (2004), 105–114. [↑](#footnote-ref-93)
93. Jan Hoesada, *Taksonomi Ilmu Manajemen,* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), h. 59 [↑](#footnote-ref-94)
94. Goerge R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 9-10 [↑](#footnote-ref-95)
95. Miriam Bduiardjo, *op.cit,* h. 408 [↑](#footnote-ref-96)
96. Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet. 4, h. 20-21 [↑](#footnote-ref-97)
97. Jim Ife dan Frank Tesoriero, *op.cit*, h.291 [↑](#footnote-ref-98)
98. Jim Ife dan Frank Tesoriero, *ibid*, h. 438 [↑](#footnote-ref-99)
99. Jim Ife dan Frank Tesoriero, *ibid*, h. 581-592 [↑](#footnote-ref-100)
100. Jim Ife dan Frank Tesiriero, *ibid,* h. [↑](#footnote-ref-101)
101. Totok Mardikanto dkk., *loc.cit*, h. 119 [↑](#footnote-ref-102)
102. Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *op.cit,* h. 29 [↑](#footnote-ref-103)
103. Jim Ife dan Frank Tesiriero, *op.cit,* h. 283 [↑](#footnote-ref-104)
104. Jim Ife dan Frank Tesiriero, *ibid,* h. 242-259 [↑](#footnote-ref-105)
105. Jim Ife dan Frank Tesoriero, *ibid*, h. 361-364 [↑](#footnote-ref-106)
106. Jim Ife dan Frank Tesiriero, *ibid,* h. 130 [↑](#footnote-ref-107)
107. Jim Ife dan Frank Tesiriero, *ibid,* h. 149 [↑](#footnote-ref-108)
108. Jim Ife dan Frank Tesiriero, *ibid,* h. 140-144 [↑](#footnote-ref-109)